SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
Kuliah IX

Menurut Sri Edi Swasono, system ekonomi Indonesia yang berdasarkan Demokrasi Ekonomi itu akan lebih cepat terwujud jika dalam setiap penyusunan kebijaksanaan dikaitkan lebih langsung dengan butir-butir demokrasi ekonomi. Dengan demikian perencanaan pembangunan sekaligus perencanaan system, dan pembangunan ekonomi sekaligus merupakan pembangunan sistemnya.

Bahwa system ekonomi adalah penting bagi setiap Negara merdeka. Tetapi harus sesuai dengan nilai-nilai budaya atau ideology bangsa yang bersangkutan. Ini terbukti dengan beberapa Negara di kawasan asia tenggara seperti Vietnam, laos dan kamboja meskipun ketiganya pernah menerapkan paham sosialisme komunisme, namun dewasa ini punya tekad untuk memiliki system ekonomi nasional yang sesuai dengan nilai budaya masing-masing.

Menurut Widjojo Nitrisastro, pembangunan ekonomi rakyat harus diberikan prioritas utama diantara soal-soal nasional lainnya. Hakikat dari pada landasan idiil pembangunan adalah pembinaan system ekonomi terpimpin berdasarkan Pancasila.

Pada siding MPR 1998, dihasilkan sejumlah ketetapan reformatif yang mengamanatkan agar mengadakan koreksi fundamental terhadap tatanan ekonomi Orde Baru. Salah satunya adalah berjudul Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi. Artinya ada anggapan bahwa pemerintah orde baru tidak membangun dan mengembankan ekonomi rakyat. Malah cenderung liberal dan hanya menguntungkan sebagian kecil perusahaan swasta konglomerat.

Berdasarkan TAP no XVI/1998 ditegaskan perlunya penerapan system ekonomi kerakyatan yang berpihak pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat. Ini sangat penting karena selama ini ekonomi rakyat sudah sangat tertinggal yang dapat menyebabkan kesenjangan sosial yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Dan ini adalah masalah yang paling gawat yang dihadapi bangsa Indonesia.

PA Samuelson menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu tentang system ekonomi bukan tentang ahli-ahli ekonomi. Ini artinya bukan berarti ekonom tidak penting tapi lebih penting lagi adalah kesepakatan tentang aturan main hubungan-hubungan ekonomi antar kelompok orang serta organisasi-organisasi, dalam produksi, distribusi, dan penggunaan barang dan jasa.

Jadi paham demokrasi ala Indonesia sebenarnya adalah seperti termuat dalam pasal 33, bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah

pimpinan atau penilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamanak bukan kemakmuran orang seorang.

Ekonomi kerakyatan dan Globalisasi

Globalisasi adalah berbahaya, mahal dan resikonya besar bagi Negara berkembang seperti Indonesia, tapi kenapa kita harus melaksanakannya juga. Dalam hal ini sangat dibutuhkan ketahanan nasional yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sepertinya Negara ini dipaksa untuk melaksanakan tindakan-tindakan ekonomi yang mungkin tidak kita sukai dan kita belum siapa melakukannya.

Yang terpenting adalah mewujudkan ketahanan nasional yang kuat dan tangguh yang sudah terbukti tidak dapat diandalkan pada sejumlah kecil pengusaha konglomeratm, tetapi justru harus mengandalkan kekuatan dan ketahanan ekonomi rakyat.

Ekonomi kelembagaan dan Ekonomi kerakyatan

Dengan teori ekonomi konvensional yang bertumpu pada persaingan bebas liberal, Indonesia tidak mampu mengembangkan ekonomi yang menguntungkan seluruh rakyat. Padahal Bung Hatta perumus kesejahteraan sosial dalam UUD 1945 menganjurkan koperasi sebagai bangun perusahaan yangn paling sesuai dengan bentuk usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Manusia menciptakan dan menggunakan lembaga-lembaga tertentu untuk memecahkan berbagai konflik di dalam masyarakat. Jika ekonomi ortodoks percaya bahwa persaingan bebas akan menciptakan harmoni, dan efisiensi. Maka ekonomi kelembagaan mencari kemungkinan tindakan bersama dan kerjasama antar manusia untuk mengatasi konflik sosial ekonomi.

Kejadian krisis ekonomi di Indonesia adalah menunjukan kurangnya perhatan ekonom pada peranan lembaga ekonomi, sosial budaya dalam masyaraka. Dan hanya memperjhatikan indicator-indikator ekonomi makro kuantitatif. Misalnya inflasi, pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa dll.

Ekonomi kelembagaan adalah cabang ilmu ekonomi yang percaya adanya peran besar lembaga dalam kinerja ekonomi suatu masyarakat. JIka lembaga adalah aturan mainnya maka organisasi adalah pemainnya. Yaitu kelompok-kelompok masyarakat yang terikat secara bersama untuk mencapai tujuan.

Peran Pemerintah dalam Ekomi Kerakyatan

Jika lembaga berperan positif dalam membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan maka pemerintah yang demokratis dituntut mampu berperan memaksakan pematuhan peraturan yang bersifat melindungi warga atau sekedar meningkatkan kepastian hukumnya.

Ilmu kelembagaan generasi baru pada umunya anti intervensi pemerintah, tetapi tetap mengandalkan model ekonomi yang memberikan perhatian peranan pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Sebab lembaga memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan perubahan-perubahan pereknomian.

Banyak orang tidak sabar menunggu penerapan system ekonmi, politik hukum dll yang benar-benar mampu mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun setidaknya dengan proses reformasi telah menjanjikan perkembangan kearah itu

Meskipun ekonomi terpimpin dan demokrasi terpimpin, hanya di terapkan di Indonesia selama 7 tahun (1959-1966) tetapi persenyawaan antara budaya feodalisme dan system ekonomi terpimpin telah melahirkan budaya atau sikap paternalistic.(feudal). Yang menganggap bahwa rakyat adalah orang bodoh, dan malas yang sulit dipercaya dan dianggap tidak menginginkan kemajuan.

Sebenarnya selama Indonesia telah merdeka rakyat tetap miskin bukan karena kesalahan dan kemauan mereka sendiri, tetapi karena system ekonomi, system politik, hukkum dan budaya yang berjalan tidak memungkinkan mereka melepaskan diri dari lingkaran setan kemiskin yang membelenggunya.